**PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
KESADARAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara)**

I Ketut Yudana Adi¹

Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Bali, Indonesia¹
email: yudanaadi70@gmail.com

Abstract

This study discusses the Influence of Self Assessment System Implementation, Awareness and Understanding of Tax Liability on Paying Taxes On KPP Pratama Badung Utara. The data in this study was obtained from questionnaires distributed to taxpayers registered in KPP Pratama Badung Utara using probability sampling methods. Respondents were used in this study were 98 responden. Uji hypothesis is used multiple linear regression equation $Y = -7.874 - 0.083X_1 + 0.522X_2 - 0.048X_3 + \epsilon$ where partial awareness of taxation affect the obligation to pay taxes is indicated by the level of Sig. $0.002 < 0.05$, while the self-assessment system and partial understanding of taxation does not affect the obligation to pay taxes, this is indicated by the level of Sig. respectively - variable massing $0.076 > 0.05$ and $0.759 > 0.05$, but simultaneously, self-assessment system, awareness and understanding of taxation positive and significant effect on the obligation to pay taxes, this is indicated by the level Sig. $0.000 < 0.05$.

Keywords: *self assessment system, taxation awareness, understanding taxation, tax paying liability.*

PENDAHULUAN

Peranan penerimaan pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan, karena merupakan sumber pendapatan dalam negeri yang lebih stabil dan dinamis. Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan.

Penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menghitung, membayarkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya

meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru.

Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. kewajiban wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui, kantor pos atau bank Badan Usaha Milik Negara. Dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Sumber Penerimaan Negara Tahun 2011-2014 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Pajak	873.874	980.518	1.184.365	1.310.219
Penerimaan Bukan Pajak	331.472	351.805	349.156	350.930
Hibah	5.254	5.787	4.484	1.360
Penerimaan Negara	1.210.600	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber : www.kemenkeu.go.id 2015

Meskipun jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun selalu saja ada faktor yang menghambat penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak belum bisa tergali secara maksimal. Kurangnya pemahaman wajib pajak

menimbulkan penurunan pendaftaran wajib pajak orang pribadi yang mendaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, sebagaimana data pendaftaran orang pribadi dan badan dapat dilihat di tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Tabel Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2011-2014

TAHUN DAFTAR	OP	BADAN
2011	4970	432
2012	4856	485
2013	3206	476
2014	3916	394

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2015

Dari data diatas dapat dilihat penurunan jumlah pendaftaran wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sangat menurun. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam kesempatan ini mengangkat judul, Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak?

- 2) Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak?
- 3) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak?
- 4) Apakah penerapan *self assessment system*, kesadaran, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kewajiban membayar pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

Difinisi Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan dari rakyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran umum pemerintah, yang bersifat memaksa

sesuai dengan undang - undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dapat ditarik kesimpulan tentang pajak, yaitu : Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara berdasarkan ketentuan serta aturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Fungsi Pajak

Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan kegiatan rumah tangga pemerintahan. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa fungsi, fungsi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- 3) Fungsi stabilitas yaitu dimana dengan adanya pajak pemerintah dapat memberikan kondisi yang stabil dalam perekonomian Negara.
- 4) Fungsi distribusi pendapatan yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Mujiyati (2011) menyatakan bahwa, sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2) Official Assessment System.

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain, seperti karcis dan nota pesanan (bill).

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

3) With holding Tax System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri

kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Penerapan *self assessment system* di Indonesia masih memiliki berbagai hambatan. Menurut Watung Ranni Angelina (2010) menyatakan bahwa, Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Perlawanan pasif, Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan antara lain:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik.
- 2) Perlawanan aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang,

b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Suryadi, (2006)

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan menurut Muliari dan Setiawan (2011, 3:45) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.

- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pemahaman Perpajakan

Semua ketentuan pemahaman kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut menurut Ekawati, (2008, 1:58) menyatakan bahwa:

- 1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
- 2) Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
- 3) Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- 4) Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan

cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

Kewajiban Wajib Pajak

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak yaitu :
 - a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 - b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 - c) Mengisi dengan benar formulir SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
 - d) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
 - e) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.
- 2) Hak-hak Wajib Pajak yaitu :
 - a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
 - b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
 - c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
 - d) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
 - e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

- 3) Tarif Pajak Penghasilan
 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1,
 Undang-Undang No. 36 tahun 2008
 (Undang-Undang tentang Pajak
 Penghasilan), maka tarif (potongan)
 pajak penghasilan pribadi adalah
 sebagai berikut:

Tabel 2.3**Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
Di atas 50 juta sd 250 juta	15%
Di atas 250 juta sd 500 juta	25%
Di atas 500 juta	30%

Sumber : www.kemenkeu.go.id 2015

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1,
 Undang-Undang No. 36 tahun 2008,
 yang besarnya kemudian dirubah
 sesuai dengan Peraturan Menteri
 Keuangan PMK 122/PMK.010/2015
 tentang Penyesuaian Besarnya
 Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagi
 pekerja yang belum kawin, PTKP
 adalah Rp 36.000.000 Bila pekerja
 kawin, bila pekerja mempunyai anak,
 ada penambahan PTKP sebesar Rp

3.000.000 untuk setiap anak dan hanya
 berlaku sampai anak yang
 ketiga. Tidak ada penambahan PTKP
 untuk anak ke-empat dan
 seterusnya. Bila istri bekerja, PTKP
 pekerja tetap sama, yaitu Rp
 36.000.000 dan tarif pajak penghasilan
 tetap sama. Berikut adalah
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 untuk status pekerja yang berbeda:

Tabel 2.4**Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Status Pekerja	PTKP (Rp)
Belum Kawin	36.000.000
Kawin, anak 0	39.000.000
Kawin, anak 1	42.000.000
Kawin, anak 2	45.000.000
Kawin, anak 3	48.000.000

Sumber : www.kemenkeu.go.id 2015

Menurut Waluyo (2008)
 mengatakan bahwa terdapat faktor-
 faktor yang mempengaruhi wajib
 pajak dalam melakukan kewajiban
 perpajakan antara lain: pengetahuan
 wajib pajak tentang pajak, pemahaman
 wajib pajak tentang peraturan
 perpajakan, manfaat yang dirasakan
 wajib pajak, sikap optimis wajib pajak
 pada pajak. Kemauan wajib pajak
 untuk memenuhi kewajiban
 perpajakan akan dapat mendorong

meningkatkan penerimaan pajak
 Negara.

Hipotesis

Menurut Erlina dan Sri
 Mulyani (2007), menyatakan bahwa
 hipotesis merupakan hubungan yang
 diduga secara logis antara dua variabel
 atau lebih yang dapat diuji secara
 empiris. Dalam penelitian ini,
 hipotesis dapat dirumuskan sebagai
 berikut:

H₁: Penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap Kewajiban Membayar Pajak.

H₂: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kewajiban Membayar Pajak.

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kewajiban Membayar Pajak.

H₄: Penerapan *Self Assessment System*, Kesadaran dan Pemahaman perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kewajiban Membayar Pajak.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel

Variabel yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1) Variabel bebas (X) atau variabel independen

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel tidak bebas atau variabel terikat. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini variabel bebasnya adalah variabel (X₁) Penerapan *Self Assessment System*, variabel (X₂) Kesadaran Perpajakan dan variabel (X₃) Pemahaman Perpajakan.

2) Variabel terikat (Y) atau variabel dependen

Variabel tidak bebas atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini variabel terikatnya adalah variabel (Y) yaitu, Kewajiban Membayar Pajak.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel memiliki suatu maksud untuk memberikan pembatasan studi sehingga dengan pembatasan tersebut, akan mempermudah dalam melakukan pengelolaan data. Definisi operasional

yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1) Penerapan *Self Assessment System*
Penerapan *self assessment system* adalah tata cara pemungutan pajak penghasilan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, dengan dilandasi menghitung, membayar dan melaporkan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan.

2) Kesadaran Perpajakan.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga indikator kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, pajak sebagai pembiayaan negara. Kedua, pajak ditetapkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Ketiga, kesadaran akan kerugian Negara. Hal ini sesuai dengan indikator yang di paparkan oleh, Widayati dan Nurlis (2010).

3) Pemahaman Perpajakan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga indikator pemahaman utama mengenai pembayaran pajak yaitu, pemahaman akan persyaratan dalam membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pemahaman akan informasi tata cara pembayaran pajak.

4) Kewajiban Membayar Pajak

Sesuai dengan kewajiban Wajib Pajak yaitu setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang

terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian ini indikator untuk kewajiban membayar pajak yaitu, ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data kuantitatif, yaitu data numerik yang dapat memberikan penafsiran yang kokoh atau dengan kata lain data ini berupa angka-angka yang diperoleh, data kuantitatif yang dipergunakan seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
- 2) Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik informasi secara lisan maupun informasi secara tulisan dan digunakan untuk mendukung data lainnya, seperti sejarah berdirinya KPP Pratama Badung Utara.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari responden dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan jawaban wajib pajak yang sedang melaporkan pajak atau sedang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
- 2) Data sekunder, yaitu data berupa buku - buku mengenai perpajakan atau literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini data jumlah pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar, yang di

peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada bagian Pengolahan Data dan Informasi.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dalam tahap ini dapat menentukan baik buruknya hasil suatu penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respons sesuai permintaan dan menggunakan Metode Dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data tertulis tentang, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, dan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Prosedur Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling probability*. *Sampling probability* merupakan pengambilan sampel dengan cara memberi peluang yang sama , yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat kuesioner disebar dan dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

Teknik Analisis

Tujuan analisis data adalah untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan

rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian.

Statistik Deskriptif

Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata (mean), median dan standar deviasi.

Uji Instrumen

Untuk melakukan uji instrument dalam penelitian ini menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas, adalah sebagai berikut:

1) Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Reliabilitas

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *Cronbach Alpha* (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Uji asumsi klasik

Sebelum peneliti melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mendukung dalam pengujian atau langkah yang akan diambil selanjutnya, adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *Variance Inflating Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,10.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis, untuk melakukan pengujian hipotesis metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena dalam penelitian ini menyangkut lebih dari dua *variabel independent* dan satu *variabel dependent*. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula, sebagai berikut : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Pengujian hipotesis dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan uji t-test, uji f-test dan determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

1) Uji Parsial (*t test*) ,Uji parsial t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan SPSS, hipotesis (H_1 , H_2 dan H_3) diterima apabila nilai signifikan dibawah ($< 0,05$) serta dilihat dari perbandingan hasil t hitung dan t tabel.

2) Uji Simultan (F test)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Dengan menggunakan SPSS, apabila nilai signifikan dibawah $0,05$ F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis (H_4) diterima yang berarti terdapat pengaruh dan sebaliknya.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

4) Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau sumbangan variabel *independent* yang diteliti terhadap

variasi naik turunnya variabel *dependent*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Uji Instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas, berikut merupakan hasil dari uji instrument yang dilakukan pada penelitian ini:

1) Uji Validitas

Untuk mengukur validitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS yaitu, dengan melihat pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Variabel dikatakan valid jika nilai *Correlated Item – Total Correlation* $> 0,30$ sebaliknya jika nilai *Correlated Item – Total Correlation* $< 0,30$ maka Suatu konstruk atau variabel tersebut dikatakan tidak valid, berikut hasil uji validitas dari masing - masing variabel pada penelitian ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Penerapan *Self Assessment System*

Variabel	Item Pertanyaan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	Keterangan
Penerapan <i>Self Assessment System</i>	Item 1	,455	Valid
	Item 2	,499	Valid
	Item 3	,648	Valid
	Item 4	,539	Valid
	Item 5	,466	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan

Variabel	Item Pertanyaan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	Item 1	,337	Valid
	Item 2	,306	Valid
	Item 3	,323	Valid
	Item 4	,353	Valid
	Item 5	,401	Valid
	Item 6	,318	Valid
	Item 7	,348	Valid
	Item 8	,383	Valid
	Item 9	,332	Valid
	Item 10	,309	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Variabel	Item Pertanyaan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	Item 1	,452	Valid
	Item 2	,494	Valid
	Item 3	,465	Valid
	Item 4	,501	Valid
	Item 5	,480	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Kewajiban Membayar Pajak

Variabel	Item Pertanyaan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	Keterangan
Kewajiban Membayar Pajak	Item 1	,598	Valid
	Item 2	,717	Valid
	Item 3	,545	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Correlated Item – Total Correlation* untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Penerapan *Self Assessment System*, Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kewajiban Membayar Pajak semuanya menunjukkan nilai $> 0,30$ sehingga dapat dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan, Suatu variabel dikatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ berikut hasil uji reliabilitas dari masing – masing variabel pada penelitian yang telah dilakukan

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Penerapan <i>Self Assessment System</i>	,754	Reliabel
2	Kesadaran Perpajakan	,681	Reliabel
3	Pemahaman Perpajakan	,718	Reliabel
4	Kewajiban Membayar Pajak	,780	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel data diatas menunjukkan bahwa masing – masing variabel penelitian mempunyai nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari

masing - masing responden dinyatakan reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Multikolinearitas, berikut merupakan hasil dari uji asumsi klasik pada penelitian ini:

1) Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini, dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel.4.12
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		penerapan self asesment system	kesadaran perpajakan	pemahaman perpajakan	kewajiban membayar pajak
N		98	98	98	98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	18,78	39,15	16,27	10,21
	Std. Deviation	3,144	2,668	2,816	2,484
Most Extreme Differences	Absolute	,090	,079	,078	,088
	Positive	,046	,074	,075	,085
	Negative	-,090	-,079	-,078	-,088
Test Statistic		,090	,079	,078	,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,050 ^c	,140 ^c	,157 ^c	,058 ^c

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing – masing variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat diketahui apabila nilai

signifikasinya $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya apabila nilai signifikasinya $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan telah terjadi heterokedastisitas pada suatu penelitian, hasil Uji *Glejser* pada penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.13
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Penerapan <i>Self Assessment System</i>	,631	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kesadaran Perpajakan	,938	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemahaman Perpajakan	,760	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel data coefficients menunjukkan bahwa massing variabel bebas mempunyai nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

3) Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya multikolinearitas pada suatu penelitian dapat dilihat

dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Penerapan <i>Self Assessment System</i>	,592	1,688	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Perpajakan	,274	3,656	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman Perpajakan	,264	3,786	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel data diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan uji analisis regresi yang dilakukan didapatkan persamaan:

$$Y = -7,874 - 0,083X_1 + 0,522X_2 - 0,048X_3 + \epsilon$$

Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan oleh Tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-7,874	4,387		-1,795	,076
penerapan self assessment system	-,083	,094	-,106	-,888	,377
kesadaran perpajakan	,522	,163	,561	3,204	,002
pemahaman perpajakan	-,048	,157	-,055	-,307	,759

a. Dependent Variable: kewajiban membayar pajak

Sumber: Data diolah, 2016

1) Uji Parsial (t test)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dalam kolom *sig.* terlihat bahwa variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai *sig.* 0,002 karena nilai probabilitas variabel kesadaran < 0,05 maka dalam penelitian ini H₂ diterima, dan dilihat dari nilai perbandingan t hitung dan t tabel dengan t hitung memiliki nilai 3,204 dan t tabel memiliki nilai 1,985 dari hasil perbandingan dilihat t hitung lebih besar dari t tabel maka H₂ diterima. Mengandung arti kesadaran perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar pajak, dengan adanya kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan variabel penerapan *self assessment system* dan pemahaman perpajakan

menunjukkan hasil *sig.* 0,377 dan 0,759 karena nilai probabilitas variabel > 0,05 maka H₁ dan H₃ ditolak. Dilihat dari nilai perbandingan t hitung dan t tabel dengan t hitung memiliki nilai - 0,888 dan t tabel memiliki nilai 1,985 dari hasil perbandingan dilihat t tabel lebih besar maka H₁ ditolak, serta dilihat dari nilai perbandingan t hitung dan t tabel dengan t hitung memiliki nilai - 0,307 dan t tabel memiliki nilai 1,985 dari hasil perbandingan dilihat t hitung lebih kecil dari t tabel maka H₃ ditolak. Dengan kata lain mengandung arti penerapan *self assessment system* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar pajak.

2) Uji Pengaruh Simultan (F test)

Tabel 4.16
Uji Simultan (F test)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	127,097	3	42,366	8,448	,000 ^b
Residual	471,403	94	5,015		
Total	598,500	97			

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel data diatas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 8,448 dan nilai F tabel 2,701(df₁ = 3, df₂ = 94). dengan probabilitas 0,00 karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel kewajiban membayar pajak

atau dengan kata lain H₄ diterima yaitu penerapan *self assessment system*, kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban membayar pajak.

3) Koefisien Determinasi/R²

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi/R²

Model	R	R Square
1	,461 ^a	,212

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel Model Summary diketahui bahwa nilai R-Square = 0.212 yang berarti penerapan *self assessment system*, kesadaran perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak sebesar 21,2% sedangkan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dari hasil uji parsial mendapatkan hasil penerapan *self assessment system* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak di KPP Pratama Badung Utara, namun Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban membayar pajak di KPP Pratama Badung Utara.
- 2) Dari hasil uji simultan mendapatkan hasil bahwa penerapan *self assessment system*, kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban membayar Pajak di KPP Pratama Badung Utara.
- 3) Dari hasil pembahasan diketahui bahwa penerapan *self assessment system*, kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak sebesar 21,2% sedangkan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya kualitas

pelayanan, tingkat kepercayaan, kepatuhan perpajakan, sanksi pajak dan sebagainya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas maka, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- 1) KPP Pratama Badung Utara dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan *self assessment system*, kesadaran dan pemahaman perpajakan, kegiatan yang dapat dilakukan seperti penyuluhan atau sosialisasi guna memberikan hasil yang diinginkan yaitu kepatuhan seluruh warga Negara Indonesia untuk melakukan kewajibannya membayar pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagi aparatur pemerintahan diharapkan memberikan sosialisasi yang lebih mendalam agar masyarakat lebih aktif dan turut serta memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Serta aparatur pemerintahan yang terkait lebih transparan agar masyarakat lebih yakin dan percaya atas kinerja pelayanan pajak di Indonesia.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas pajak. Disarankan agar menambah variabel independen, dependen, moderating, intervening yang memiliki kemungkinan untuk dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap WP Pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi empiris Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang. Tesis Sarjana Akuntansi pada fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dwi Rahayu. 2009. "Jurnal Akuntansi". *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan*, Semarang.
- Ekawati . 2008. "Jurnal Ekonomi Bisnis". *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, 15 (1) : 58.
- Erly Suandy. 2008. *Pengantar Perpajakan Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erlina dan Sri Mulyani. 2007. Metode Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen. USU Press, Medan.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah Masalah Perpajakan*. Jakarta : Murai Kencana.
- Ilyas dan Burton. 2007. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.
- Judisseno Rimsky. 2007. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamdi Nugroho. 2012. "Jurnal Akuntansi 2012". *Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. Studi Empiris pada Pegawai Negeri Yang Ada di Lingkup Universitas Akuntansi*, 1 (1) : 91-96.
- Hari Adi Priyono. 2009. "Simposium Nasional Perpajakan II". *Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak*.
- Kementerian Keuangan, 2014. DJP : Sumber Penerimaan Negara Tahun 2011-2014. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/22371>. Diakses pada senin 23 november 2015 11:47
- Kementerian Keuangan, 2015. DJP : Lapisan Penghasilan Kena Pajak/PKP/2015. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/21322>. Diakses pada sabtu 28 november 2015 09:15
- Kementerian Keuangan, 2015. DJP : Penghasilan Tidak Kena Pajak/ptkp/2015. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/22371>. Diakses pada kamis 31 Maret 2016 11:47
-

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Mujiyati. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muliari dan Setiawan. 2011. "Jurnal Akuntansi & Bisnis" *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, 6 (3) : 45
- Siahaan, Marihot. 2008. *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2006. "Jurnal Keuangan Publik". *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. 4 (1) 105-121.
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryan. 2011. "Jurusan Akuntansi Analisis". *Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Tarsis Tarmudji. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Universitas Bina Darma.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia, Edisi kedelapan*, Buku satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Watung Ranni Angelina. 2010. "Jurnal Akuntansi" *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Yogyakarta (Studi Kasus pada Usaha Restoran di Kota Tomohon)*, Fakultas Ekonomi Universitas Manado.
- Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. "Symposium Nasional Akuntansi XIII". *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

*Kemauan Untuk Membayar
Pajak Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Melakukan
Pekerjaan Bebas (Studi Kasus
Pada Kpp Pratama Gambir
Tiga), Purwokerto: Sam
Ratulangi*